

**Kurikulum dan Mutu Pendidikan
(Telaah atas Kebijakan Perubahan Kurikulum
dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional)**

oleh : Munawaroh

Abstrak

Aspek yang terpenting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah mengadakan perubahan kurikulum. Ada dan perlunya perubahan kurikulum itu didasari oleh sebuah pemikiran dan kenyataan bahwa ketika terjadi perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, maka aspek yang harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan dalam pendidikan adalah kurikulum; kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Perubahan kurikulum yang perlu dilakukan meliputi semua jenjang dan satuan pendidikan. Termasuk dalam hal ini adalah peraturan pengembangan yang baru yang dalam realitanya telah membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum seperti pembaruan dan diverifikasi kurikulum.

Kata kunci: kualitas pendidikan, perubahan kurikulum

A. Pendahuluan

Sepuluh tahun lebih reformasi telah berjalan, perubahan demi perubahan untuk mencapai arah dan tujuan yang lebih baik selalu dan terus dilakukan, tidak hanya dalam bidang pendidikan saja, tetapi juga dalam berbagai sektor bidang kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Demikian juga dengan berbagai kebijakan yang dibuat dan ditempuh oleh pemerintah, tidak lain adalah untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dan lebih memihak pada kepentingan masyarakat, serta lebih demokratis.

Pada kenyataannya telah ditunjukkan bahwa dalam berbagai perubahan, secara langsung maupun tidak langsung keterlibatan dunia pendidikan tidak bisa dinafikan. Walaupun di sisi lain juga tidak bisa dicalakkan bahwa tidak sedikit dan perubahan-perubahan yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yang berada di luar pendidikan. Bahkan secara lebih khusus, perubahan-perubahan perilaku peserta didik sering kalau tidak bisa dikatakan dapat dipastikan - dipengaruhi oleh dunia luar, dunia yang berada di dunia pendidikan formal, dunia yang tidak jarang ódak atau kurang terjamah oleh pendidikan, dunia yang lebih jelas dari pada hanya sekadar dunia sekolah.

Berdasar atas perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta didik yang banyak dipengaruhi oleh dunia luar sekolah, maka sudah menjadi keharusan bagi para pelaku atau penyelenggara pendidikan untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar, baik pada proses maupun output pendidikan. Para pelaku pendidikan harus merubah berbagai kebijakan-kebijakan lama yang kurang berorientasi pada perkembangan dunia sekarang dan masa mendatang, serta membuat kebijakan-kebijakan baru yang lebih mendasar dan berkaitan dengan dunia pendidikan modern. Oleh karena itu, secara khusus perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan, yaitu untuk mencapai tujuan yang baik dan mampu menghasilkan output yang siap menghadapi tantangan internal dan eksternal modernisasi harus dipandu dengan kurikulum yang baik dan adaptif.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa visi reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan reformasi kehidupan nasional yang tertera dalam garis besar haluan Negara tahun 1999 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memiliki etos kerja yang dan serta disiplin. Perwujudan dan visi reformasi pembangunan ini adalah menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang semakin berperan dalam menampilkan keunggulan dirinya sebagai pribadi-pribadi yang tangguh, kreatif, mandiri, dan profesional dalam bidangnya masing-masing.

Oleh karena itu sebagai konsekuensinya, pembangunan dalam pendidikan nasional mau tidak mau harus mengalami perubahan, baik yang berkaitan dengan kurikulum, format materi, sarana dan prasarana, maupun sistem dengan penyempurnaan secara terus menerus. Pengembangan pendidikan nasional secara terus menerus ini lebih banyak menggunakan instrumen kurikulum ketimbang komponen lain. Munculnya berbagai macam kecenderungan sekolah seperti sekolah favorit, plus, teladan, terpadu, dan sekolah bertaraf internasional, adalah merupakan fenomena baru dalam dunia pendidikan yang mengharuskan adanya perubahan dan pengembangan kurikulum. Walaupun pada kenyataannya sebagai konsekuensinya, seringkali perubahan dan pengembangan kurikulum secara langsung memberatkan

peserta didik. Dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah telah membangkitkan berbagai pihak untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan, meskipun disadari bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan bukan merupakan masalah yang sederhana, tetapi memerlukan penanganan yang serius dan multidimensi dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.

Peningkatan kualitas pendidikan secara terus menerus dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Upaya ini lebih terfokus setelah diamanatkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2002 yang mencanangkan "Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan". Namun demikian, berdasar pada berbagai indikator mutu pendidikan dalam perjalanannya belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Meskipun sebagian sekolah, terutama yang berada di kota-kota besar telah menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

Di antara upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyempurnaan sistem pendidikan, adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang diamandemen Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Bila sebelumnya pengelolaan atas penyelenggaraan pendidikan merupakan wewenang pemerintah pusat (sentralistis), maka dengan berlakunya Undang-undang tersebut diharapkan kontribusi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur dan adaptif terhadap berbagai perubahan.

Berbagai perubahan tersebut antara lain dapat dilihat dalam pendidikan formal, dimana pelaksanaan pendidikan formal ini dibagi atau diatur dalam beberapa tahapan pelaksanaan pendidikan. Setiap tingkat memiliki tujuan tersendiri yang merupakan penjabaran dan tujuan umum nasional. Tujuan setiap tingkat pendidikan dinamakan tujuan lembaga pendidikan atau tujuan institusional. Untuk mencapai tujuan institusional, diperlukan alat dan sarana pendidikan, salah diantaranya adalah kurikulum untuk setiap lembaga pendidikan.⁴

Dalam kitannya dengan pendidikan nasional yang selama ini dirasa belum mengalami peningkatan, menurut Umaedi hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain, yaitu:5

1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan education production function atau input-output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsisten.
2. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis sentralistis.
3. Minimnya peran serta masyarakat, khususnya orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Faktor yang pertama, yaitu kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan education production function atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Dalam pendekatan ini diasumsikan bahwa lembaga pendidikan hanya berfungsi sebagai pusat produksi, yang apabila dipenuhi semua input yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Oleh karena itu, pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya terpenuhi maka mutu pendidikan (output) secara otomatis akan terbentuk. Walaupun pada kenyataannya mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi dan tidak terealisasi. Tenth hal ini dikarenakan bahwa selama ini dalam menerapkan pendekatan education production function hanya dan terlalu memusatkan pada input pendidikan, kurang dan tanpa memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal apabila dicermati dengan serius, justru dalam proses itulah sebenarnya arti penting penyelenggaraan pendidikan.

Di sisi lain, sebagai faktor yang kedua dan sebagaimana yang telah terjadi, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis sentralistis. Penyelenggaraan pendidikan secara birokratis-sentralistis ini pada akhirnya menyebabkan proses penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah sepenuhnya sangat tergantung pada kebutuhan birokrasi di tingkat pusat, yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan bahkan tidak jarang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selalu tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kebilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan

memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Demikian juga dengan faktor yang ketiga yaitu minimnya peran serta masyarakat, khususnya orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan. Selama ini keberadaan masyarakat kurang atau bahkan tidak pernah diperhatikan dan diikutsertakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kalau pun ada, maka partisipasi masyarakat selama ini lebih banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas). Padahal keikutsertaan masyarakat, khususnya orang tua peserta didik dalam proses pendidikan, baik keikutsertaan dalam memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, memantau proses perjalanan pendidikan, penilaian dan lain sebagainya sebenarnya memiliki peranan yang cukup penting dan signifikan. Karena bagaimanapun juga pendidikan formal, dalam hal ini sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat.

Berdasar atas fenomena kelangkaan pendidikan yang demikian ini, Tilaar mengemukakan bahwa pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis pokok, yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi/efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Lebih lanjut Tilaar mengemukakan bahwa sedikitnya ada enam masalah pokok yang dihadapi sistem pendidikan nasional yaitu: pertama, menurunnya akhlak dan moral peserta didik; kedua, pemerataan kesempatan belajar; ketiga, masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan; keempat, status kelembagaan; kelima, manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional; dan keenam, sumber daya yang belum profesional.⁶

Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut di atas, sebagai suatu langkah yang mendesak adalah perlu dilakukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dalam hal ini perlu adanya perubahan sosial yang memberi arah bahwa pendidikan merupakan pendekatan dasar dalam proses perubahan, untuk itu kegiatan belajar harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (life skill atau soft competency) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kemampuan peserta didik di mana mereka berada.

Demikian juga dengan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan solutif atas problem-problem yang terjadi dalam proses pembelajaran merupakan strategi yang cukup penting yang harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal ini terdapat dua prinsip pendidikan yang sangat relevan dengan Pancasila, sebagaimana diralig dinyatakan oleh UNESCO dalam Djohar bahwa pertama pendidikan harus diselenggarakan berdasarkan pada empat dimensi yaitu learning to know (belajar mengetahui), learning to do (belajar melakukan), learning to live together (belajar hidup dalam kebersamaan), dan learning to be (belajar menjadi diri sendiri); kedua Life long education (belajar seumur hidup).⁷ Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan menempuh strategi baru dalam menciptakan masyarakat yang cerdas agar tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman dan dalam berbagai bidang kehidupan.

Perkembangan terakhir atas isu yang terjadi dalam dunia pendidikan nasional adalah terkait dengan mutu pendidikan. Perkembangan isu atas peningkatan umum pendidikan baik pada lingkup lembaga pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Secara lebih khusus, dalam hal ini adalah munculnya kebijakan yang terkait dengan pemberlakuan kurikulum satuan tingkat pendidikan. Sebuah kurikulum yang diharapkan dapat mengantisipasi dan membenarkan solusi terhadap mutu pendidikan nasional yang selama ini dirasa cukup rendah dan tidak mencerdaskan masyarakat, bangsa.

Kebijakan pemberlakuan atas kurikulum baru ini dilandasi atas berbagai pertimbangan yang cukup mendasar. Beberapa pertimbangan itu antara lain adalah bahwa kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan. Tujuan-tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan tidak akan pernah tercapai tanpa didasarkan dan diarahkan oleh kurikulum, karena kurikulum inilah yang akan mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan. Dengan kata lain, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu pembentukan manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa yang mempunyai peranan penting dalam suatu sistem pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan harus mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang bertakwa, cerdas, terampil dan berbudi luhur-, berilmu, bermoral, tidak hanya sebagai mata pelajaran yang harus diberikan kepada peserta

didik semata-mata, melainkan sebagai aktivitas pendidikan yang direncanakan untuk dialami, diterima dan dilakukan.⁸

Berdasarkan paradigma demikian, maka kurikulum sekolah merupakan instrumen strategis dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, kurikulum sekolah juga memiliki koherensi yang amat dekat dengan upaya pencapaian tujuan sekolah dan/atau tujuan pendidikan. Oleh karena itu, perubahan dan pembaruan kurikulum harus mengikuti perkembangan, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan menghadapi tantangan yang akan datang serta menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, baik dikarenakan perubahan kebutuhan/kecenderungan maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pendidikan juga harus menyesuaikan. Artinya kurikulum pendidikan juga harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan zaman.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Karhami⁹ bahwa aspek yang terpenting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah mengadakan perubahan kurikulum. Atas dasar pemikiran ini, maka dalam sistem pendidikan nasional kita telah mengalami beberapa perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 1975, kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan pengembangan dari kurikulum 1975. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang merupakan pengembangan dari kurikulum 1975 misalnya, diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan mempersiapkan peserta didik, mulai dari tahap yang paling awal sampai hasil akhir; melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap sistem pendidikan agar lebih efektif, efisien dan berhasil guna. Kurikulum berbasis kompetensi ini dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dan dapat menyesuaikan dalam perubahan dan perkembangan zaman. Dan kini dikenalkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang hampir sama dengan kurikulum berbasis kompetensi.

Ada dan perlunya perubahan kurikulum ini didasari atas sebuah pemikiran dan kenyataan sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhadi (2002) bahwa ketika terjadi perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan

bernegara, maka aspek yang harus segera ditanggapi dan diperkembangkan oleh para pengambil kebijakan dalam pendidikan adalah kurikulum, kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Perubahan kurikulum yang perlu dilakukan meliputi semua jenjang dan satuan pendidikan. Termasuk dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang baru yang dalam realitanya telah membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum seperti pembaruan dan diversifikasi kurikulum.

C. Kebijakan Perubahan Kurikulum

Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pendidikan nasional telah berkali-kali mengadakan perubahan. Perubahan yang paling esensi dalam sistem pendidikan nasional ini adalah perubahan kurikulum. Kurikulum pendidikan nasional telah berkali-kali mengalami perubahan, tiga kali perubahan yang terakhir adalah mulai dari kurikulum 1994, kurikulum 2004 yang terkenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi, dan Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).

Perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi dalam sistem pendidikan nasional tidak jarang membawa implikasi-implikasi yang beragam, baik negatif maupun positif. Pada kenyataannya, implikasi perubahan kurikulum itu membawa sekian banyak problem yang tidak mudah untuk dipecahkan, dan problem-problem ini tidak hanya dialami oleh para penyelenggara pendidikan di tingkat pusat, akan tetapi juga di tingkat daerah, khususnya para pendidik di tingkat satuan pendidikan (sekolah) masing-masing. Masyarakat pun pada umumnya menanggapi dengan nada sinis dan negative, sehingga terkesan bahwa pendidikan kita adalah pendidikan yang plin-plan, ketika ada pergantian menteri (pendidikan) berganti pula kurikulum, kebijakan kurikulum yang dilaksanakan belum tuntas/maksimal sudah berganti lagi dengan kurikulum yang baru, peserta didik menjadi 'kelinci percobaan', dan seterusnya.

Bagi sementara masyarakat luas, mungkin anggapan atau pendapat yang mereka kemukakan tidak ada salahnya. Akan tetapi perlu dipahami bahwa kebijakan perubahan kurikulum itu pada hakekatnya tidak bisa dipahami sedemikian sederhana. Kebijakan untuk melakukan perubahan atas kurikulum pendidikan ini didasari oleh suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari, dan bahkan perubahan kurikulum itu harus dilakukan. Kenyataan-kenyataan itu antara lain bahwa

pendidikan yang dilaksanakan selama ini dinilai gagal, tidak bisa menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap pakai, adanya perubahan-perubahan tujuan/kebijakan, perubahan sistem pendidikan, dan perubahan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan semua kenyataan ini merupakan problem-problem yang esensi dan mendasar, sehingga apabila tidak dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan kurikulum, maka pendidikan nasional tidak akan ada fungsinya dan tertinggal jauh dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kurikulum harus disempurnakan, dan karena kurikulum ini menduduki peran sentral dalam upaya menghantarkan semua penyelenggara pendidikan dan peserta didik mencapai tujuan pendidikan nasional. Sebagai konsekuensinya, maka proses pendidikan (pembelajaran) juga harus menyesuaikan dengan kurikulum dan tujuan yang telah ditetapkan, dari pusat sampai daerah (sekolah), sehingga bila diilustrasikan, maka tujuan-kurikulum-proses pendidikan (pembelajaran) itu merupakan segitiga yang sama dengan lainnya saling berkaitan.

Pertama, sentralisasi pengembangan kurikulum; sebagaimana yang dinyarakah oleh Suhandijab bahwa pada hakekatnya desentralisasi dalam pengembangan kurikulum membicarakan masalah pemberian wewenang dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan sentralisasi atau sistem pengembangan kurikulum secara sentral terpusat adalah keterlibatan pemerintah pusat dalam mengembangkan kurikulum atau program pendidikan yang akan diterapkan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaklud dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.^o

Adanya sistem sentralisasi pengembangan kurikulum tersebut mempunyai tujuan agar memperoleh bentuk kurikulum inti yang wewenang penanganannya diserahkan kepada Menteri Pendidikan Nasional. Pada tingkat provinsi (Tingkat I), kewenangannya diberikan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional tingkat provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota, kewenangannya diserahkan kepada Kantor Departemen Pendidikan Nasional (Diknas Kabupaten/Kota), dan pada tingkat sekolah wewengannya diserahkan kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan. Hierarki kewenangan dalam pengembangan kurikulum tersebut dikenal dengan nama model pengembangan dari atas ke bawah (top-down), sebaliknya kadang-kadang terjadi pula penyusunan dan pengembangan kurikulum dari bawah ke atas.

Dalam kaitannya dengan administrasi, bahwa administrasi menyangkut dua hal, sebagaimana dikatakan Husen (1985) pada kutipan Subandijah pertama, pemahaman mengenal tingkah laku organisasi sosial melalui suatu pendekatan rasional; kedua, berhubungan dengan norma- norma teknik yang didesain menurut karakteristik sistem agar dapat memperoleh petunjuk itu sendiri. Ringkasnya, administrasi mempelajari karakteristik khususnya dalam tiap-tiap hubungan sosial, dan administrasi itu sendiri termasuk dalam gejala social.

Dalam pengertian administrasi sebagai gejala sosial, administrasi mempunyai makna sebagai seperangkat teknik yang digunakan untuk mengarahkan dan mengorganisasikan sumber, proses, dan gejaia yang mempunyai hubungan dengan struktur kondisi sosial yang ada dan berhubungan dengan kondisi sosial yang ditentukan secara historis. Sebagai suatu organisasi dan sistem, dalam pengembangannya, pendidikan mementingkan sistem administrasi yang baik dan mapan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pendidikan tersebut. Sama halnya dengan kurikulum, sistem pengembangannya mementingkan pendekatan pendekatan yang tepat. Apabila pendidikan digunakan sebagai sarana mengemhangkan semua komponen pembangunan, maka pola pengembangan pendidikan dan kurikulum secara sentralisasi dan desentralisasi sangat perlu diaplikasikan.

Kedua, desentralisasi pengembangan kurikulum; desentralisasi adalah bentuk organisasi yang menghubungkan otonomi organik dengan aspek-aspek kelembagaan tertentu bagi daerah tertentu yang ditinjau dan aspek administrasi. Berkaitan dengan makna desentralisasi tersebut, terdapat makna administrasi yang bersifat desentralisasi sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap siapa yang mempunyai wewenang mengorganisasikan dalam mencapai kecocokan dan kesesuaian komponen kesembagaan dengan cara menjaga keseimbangan dan keharmonisan yang dinamis.²

Prinsip dasar desentralisasi ialah pendelegasian dari segala otoritas dan fungsi terhadap semua level hierarkis tersebut. Dalam hubungan dengan desentralisasi administraiif secara tradisional terdapat tiga bentuk, yaitu by technical service, by territotial function, dan by cooperation. Maksudnya, desentralisasi administrasi

kurikulum mempunyai makna yang berkaitan dengan teknik-teknik pelayanan, fungsi teritorial, dan adanya kerjasama.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa desentralisasi juga dapat dipahami dengan sederhana, yaitu memiliki persoalan administrasi dan kewenangan (mengenai kurikulum atau hal lainnya). Desentralisasi pengembangan kurikulum mempunyai makna bahwa pengembangan kurikulum sekolah yang dihubungkan dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan pengembangan daerah dapat dimulai dari pemegang kewenangan dan pengajaran (pengembangan kurikulum) yang bermula dari sekolah bersama dengan guru. Walaupun pada kenyataannya, sistem pendidikan di Indonesia masih menganut sistem sentralisasi, hal ini karena kebijakan desentralisasi pendidikan seolah-olah masih semu (fiktif). Maksudnya, persoalan administrasi dan kewenangan itu sejaris dengan pengembangan kurikulum yang sudah terbentuk dalam kurikulum pendidikan nasional. Secara umum, sentralisasi pengembangan kurikulum di Indonesia masih sangat dominan.

Ketetapan suatu pola administratif dan pengembangan kurikulum di suatu negara sangat bergantung pada kebijakan pemegang otoritas di sekolah atau lembaga yang bersangkutan, dan akan lebih bermanfaat jika pola pendekatan administratif secara desentralisasi diaplikasikan. Pendekatan ini lebih bermanfaat karena dengan beberapa alasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Idi sebagai berikut:

- a. Tingkat demokrasi yang lebih tinggi disenangi oleh partisipan pelaksanaanya).
- b. Keputusan-keputusan yang diadopsi dalam basis partisipasi yang lebih menginginkan konsensus yang lebih besar.
- c. Keputusan-keputusan dalam sistem desentralisasi menirukan perhatian yang serius untuk kebutuhan yang konkret.
- d. Partisipasi mempromosikan proses kreativitas individu untuk manfaat organisasi.
- e. Koherensi organisasi yang bersifat internal disediakan jika koordinasi dan petunjuknya benar, dan jika hubungan-hubungan atau saluran-saluran komunikasi yang efisien diadakan.
- f. Biaya personalia dan kertas kerja dapat ditekan sedemikian rupa dalam kantong-kantong pusat (central offices).³

Berdasar pada uraian di atas, jelas bahwa manfaat pengaplikasian pola desentralisasi dalam pengembangan kurikulum dapat dimiliki dari berbagai

komponen, yakni partisipasi, legitimasi (pengesahan keputusan), psikomotor perkiraan, kreasi dan inovasi, serta integrasi dan efisiensi. Meskipun demikian, berbagai aspek perlu dipertimbangkan sebelum sistem desentralisasi kurikulum diaplikasikan. Aspek-aspek tersebut antara lain: karakteristik khusus dan sistem sosial, ekonomi, dan kekuatan ekonomi; tingkat evolusi dan kompleksitas administrasi; perbedaan kesanggupan pemerintah daerah dalam memperoleh dana dan juga pendistribusiannya; kurangnya tenaga teknis; minimnya kontribusi untuk pelaksanaan program dari pihak pemerintah dan non pemerintah; kondisi geografis yang berbeda-beda coraknya memerlukan biaya yang besar dan perbedaan kualitas pendidikan di daerah tertentu dengan daerah lainnya; dan juga kondisi sosial politik suatu negara.

Memperhatikan aspek-aspek di atas secara teliti dan mendetail akan memberikan inspirasi kepada kita bahwa keberadaan sistem kurikulum desentralisasi sangat tergantung pada berbagai kondisi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Idi.¹⁴ Jenis negara misalnya, negara maju atau negara berkembang; negara kepulauan atau negara benua; GNP tinggi atau GNP rendah; kondisi sosial politik; ada tidaknya atau sejauh mana perbedaan kualitas pendidikan antar daerah; sumber dana, dan lain-lain. Semua tentu menjadi pertimbangan utama dalam mengaplikasikan ide desentralisasi ke dalam pengembangan kurikulum. Mungkin dengan mempertimbangkan alasan-alasan seperti itulah pola administrasi kurikulum pendidikan di Indonesia masih banyak memberi porsi yang lebih tinggi kepada aspek sentralisasi daripada desentralisasi.

D. Keputusan Kurikulum dan Pengaruhnya dalam Pengembangan Kurikulum

Menurut Marsh & Stafford,¹⁵ pembuat keputusan (decision makers) adalah pihak-pihak (individu-individu atau kelompok) yang dikarenakan status profesi atau posisinya dapat membuat keputusan-keputusan spesifik mengenai kurikulum untuk disusun dan diimplementasikan dalam sekolah-sekolah tertentu. Walaupun mungkin terdapat perbedaan antara pembuat keputusan kurikulum negara-negara maju dengan negara yang belum maju. Di negara maju, banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Pendidik (guru) dan anak didik membuat keputusan-keputusan mengenai bahan kurikulum spesifik yang berkaitan dengan kelas mereka masing-masing. Kepala sekolah dapat melakukan atau membuat keputusan-

keputusan kurikulum yang mempengaruhi semua staf pada sekolah tertentu. Berbagai direktur jenderal, direktur, dan pengawas sering membuat keputusan kurikulum yang akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas di ratusan dan bahkan ribuan sekolah serta ribuan pendidik (guru) dan peserta didik.

Berikut contoh-contoh jenis keputusan kurikulum yang dibuat oleh pihak-pihak terkait (individu dan kelompok) sebagaimana yang dinyatakan oleh Ildi yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.¹⁶

Tabel 1: Pembuat Keputusan Kurikulum

Decision Makers	Predominant Level of Involvement	Examples of a Goal/Demand	Influence on Policy Decision	Influence Planning Specific Syllabus Decision	Influence on Decision about Teaching Methods
Teachers	School-focused education for Primary Classes	Daily Physical	Low	Medium	High
Principles	School-focused	Sequentel Maths and High English Programs	High	Medium	Medium
School Council (vic.)	School-focused	School Improvement High Programs	High	High	Medium
Superintendence/ Inspectors	State	Skill Emphasis in Programming	High	High	Medium
State Heads of Education Systems (including directors general)	State	Programs for Intellectually Talented Children	High	Low	Low
Statutory Boards	State	Syllabuses for Senior School Students	High	High	Medium

Dalam hal ini, personalia pada level sekolah membuat keputusan dalam kurikulum, pada umumnya keputusan yang dibuat berhubungan dengan aktivitas pengajaran sehari-hari. Pada tingkat sekolah ini, pembuatan keputusan tersebut dilakukan oleh kepala sekolah maupun pendidik. Sedangkan personalia di luar sekolah membuat berbagai keputusan yang berhubungan dengan pembuatan atau pemindahan

program-program secara keseluruhan. Pembuatan keputusan dalam berbagai hal yang terkait ini dilakukan oleh pengawas, atau kepala pada tingkat provinsi.

Sebagai suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari, bahwa para pembuat keputusan tersebut tidak melaksanakannya dalam suatu kevakuman, melainkan dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain dipengaruhi oleh banyaknya individu dan kelompok. Mungkin juga dipengaruhi oleh kontak-kontak informal, dan bahkan interview –serta pengaturan dari organisasi-organisasi tertentu. Kadang-kadang kelompok dan individu-individu yang berkepentingan tampak lebih memperhatikan penyebaran slogan tertentu dari pada mengharapkan hasil yang spesifik. Kemudian kelompok kepentingan tersebut mungkin memfokuskan pada proses atau prosedur yang mereka inginkan, dengan sedikit berhubungan atau bahkan menggunakan ide-ide yang kokoh tentang berbagai hasil akhir apa yang mungkin akan terjadi. Kelompok-kelompok yang berhubungan dengan tiga aspek (slogan, proses dan specific outcome) itu biasanya mewujudkan diri sebagai pressure group. Mereka memiliki tujuan khusus dan menemukan metode yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁷

Kelompok kepentingan (interestgroup) dapat mempengaruhi pembuat keputusan pada level sekolah. Sama halnya pada level pusat (state level), berbagai interest group berusaha mempengaruhi anggota-anggota parlemen dan anggota senior sistem pendidikan untuk menyetujui keinginan mereka. Mereka mungkin mencoba mempengaruhi pegawai-pegawai pendidikan dengan kontak pribadi yang tidak formal atau dengan perwakilan mereka dalam akreditasi dan sama halnya dengan panitia ujian. Banyak lagi bentuk-bentuk pengaruh yang mungkin terjadi dalam pembuatan keputusan kurikulum' di negara-negara maju.⁸

Jadi, pengambilan keputusan dalam kurikulum adalah pendidik, kepala sekolah, peserta didik, direktur jenderal, direktur-direktur, dan lain-lain; dan berbagai interest group yang mewakili level pusat (state/ national) adalah teachers unions, religious organization, curriculum development centre, dan lain-lain. Faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi pembuatan keputusan kurikulum tentu masih banyak. Semakin maju pendidikan suatu negara itu, semakin banyak pula interest groups yang turut mempengaruhi pembuatan keputusan kurikulum, yang tentunya berfungsi sebagai input yang masih perlu diseleksi dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Oleh karena itu harus dipahami bahwa pembuatan keputusan yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum merupakan proses kebijakan yang di dalamnya terdapat tanggung jawab sebagai pihak yang berkepentingan dengan masalah pendidikan secara legal. Walaupun kadang juga ditemukan sikap pro dan kontra, yakni sikap menerima dan menolak terhadap hasil keputusan kurikulum. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan sudut pandang terhadap hasil keputusan kurikulum dan fungsi sekolah.

Adanya pandangan untuk menerima dan menolak atas hasil keputusan kurikulum terletak pada pandangan pembuat keputusan kurikulum terhadap fungsi dan tujuan sekolah. Misalnya, apakah sekolah diselenggarakan dengan fungsi mengembangkan pertumbuhan moral religius individual peserta didik, menyampaikan mata pelajaran, ataukah dalam rangka menyiapkan peserta didik untuk kehidupan di masyarakat.

a. Tingkatan Pengambilan Keputusan Kurikulum

Menurut Subandiah, secara hierarkis pengambilan keputusan dalam pembuatan dan pengembangan kurikulum (khususnya di Indonesia) dapat ditinjau dari beberapa tingkat yakni ,⁹

1. Pengambilan keputusan di tingkat nasional

Pengambilan keputusan di tingkat nasional ditangani oleh pemerintah pusat. Artinya, kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau menteri lain, atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional, kemudian, pelaksanaan keputusan kurikulum dilakukan oleh Dirjen tertentu, seperti Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen).

2. Pengambilan keputusan di tingkat provinsi

Pengambilan keputusan di tingkat provinsi merupakan pengaplikasian keputusan kurikulum dari pusat yang dilakukan oleh bidang tersebut pada Kantor Pendidikan nasional wilayah provinsi. Sebagai contoh, Sekolah Dasar dilaksanakan atau ditangani oleh Kabid Pendidikan Dasar.

3. Pengambilan keputusan di tingkat sekolah

Di tingkat sekolah, pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan dan pelaksanaan kurikulum dari pusat dilakukan oleh kepala sekolah tersebut

4. Pengambilan keputusan di tingkat kelas

Pengambilan keputusan di tingkat kelas diberikan kepada guru kelas atau bidang studi yang berwenang melaksanakan kurikulum dan pusat. Dalam hal ini sampai ke dalam bentuk keputusan yang paling kecil, yakni dalam bentuk Satuan Pelajaran (SP).

Jika diurutkan tingkat pengambilan keputusan kurikulum ditinjau dari segi kewenangannya adalah: departemen, kantor departemen wilayah, sekolah, dan kelas. Sedangkan jika dilihat dari segi aspek teoritisnya, pengembangan kurikulum dapat dilihat dari hierarki pengambilan keputusan dan tingkat-tingkat kelembagaan, yang terdiri atas: (1) pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, dan (2) pengembangan kurikulum di tingkat kelas. Pengembangan kurikulum di tingkat sekolah merupakan ide Malcolm Skilbeck seperti yang dikutip oleh Idi dengan mengajukan langkah-langkah sebagai berikut ³³

5. Analisis situasional
6. Perumusan tujuan
7. Penyusunan program
8. Integrasi dan implementasi
9. Monitoring, umpan balik, penilaian dan rekonstruksi.

Menurut Skilbeck, formulasi rujukan berdasarkan analisis situasional itu berbeda dengan sistem instruksional PPSI yang berorientasi pada goal-oriented approach. Sedangkan, pengembangan kurikulum di tingkat kelas yang berlaku sekarang adalah satuan pelajaran yang komponennya terdiri atas: Pokok Bahasan, Tujuan Instruksional & Umum (TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK), Bahan, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Alat, Sumber Belajar, dan Evaluasi.

b. Tahap-tahap Pengembangan Kurikulum

Menurut Soetopo, ada tiga tingkat atau tahapan dalam mengembangkan kurikulum suatu sekolah, dimana semuanya pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Tingkat pertama, tahap yang dikenal dengan nama pengembangan program pada tingkat lembaga; kedua, tahap pengembangan program bidang studi; ketiga, tahap pengembangan program di kelas, yang dilakukan oleh guru di kelas pada suatu sekolah.² Uraian berikut akan mengungkapkan ketiga tahapan pengembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia, yakni:

- 1) Pengembangan kurikulum pada tingkat lembaga

Pengembangan kurikulum pada tingkat lembaga dimaksud adalah pengembangan seluruh program kegiatan yang tertuang di dalam kurikulum pendidikan tersebut. Dalam pengembangan kurikulum tahap ini terdapat tiga pokok bagian, yakni (1) perumusan tujuan institusional, 2) penetapan isi dan struktur program, dan (3) penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan.

Pertama, perumusan tujuan institusional adalah perumusan mengenai pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik setelah mereka menyelesaikan seluruh program pendidikan di suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Lembaga pendidikan tersebut adalah SD/MI, SMP/MTs, SMA (SMU) / MA / STM / SMK, dan lain-lain. Perumusan tujuan institusional ini paling tidak bersumber pada sumber-sumber berikut tujuan pendidikan nasional (yang tertuang dalam GBH-JN), keinginan masyarakat, pejabat pemerintah, dan dunia kerja. Dan perumusan tujuan institusional ini diharapkan dapat menggambarkan produk dan lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik yang khas.

Kedua, penetapan isi atau struktur program adalah menentukan bidang-bidang studi yang akan diajarkan pada suatu lembaga pendidikan. Sedangkan penetapan struktur program merupakan penerapan atau penentuan jenis-jenis program pendidikan, sistem semester / catur wulan, jumlah bidang studi, dan alokasi waktu yang diperlukan.

Ketiga, penyusunan strategi pelaksanaan kurikulum adalah upaya memilih, menyusun, dan memobilisasi segala daya, tenaga dan sarana pada cara-cara mencapai tujuan secara efisien. Dalam menyusun strategi, pelaksanaan kurikulum meliputi berbagai kegiatan, mulai dan melaksanakan pengajaran, melakukan penilaian, melaksanakan bimbingan, dan penyuluhan, serta melaksanakan administrasi.

2) Pengembangan program tiap bidang studi

Tujuan dan pengembangan program pada tiap bidang studi ini adalah untuk mencatat tujuan kurikuler, yakni tujuan bidang studi yang akan dicapai selama program itu diajarkan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam kegiatan pengembangan program pada tiap bidang studi, yakni pertama,

penetapan pokok-pokok bahasan dan subpokok bahasan yang didasarkan atas tujuan kelembagaan (institusional).

Kedua, penyusunan garis-garis besar program pengajaran (GBPP). Setelah selesai merumuskan tujuan kurikuler, tujuan institusional, pokok bahasan, dan subpokok bahasan, semuanya kemudian disusun secara beraturan menurut urutannya, serta menentukan kelas, caturwulan, jumlah jam pdajaran, dan sumber buku. Pada GBPP tersebut disusun sub-sub bidang studi.

Ketiga, penyusunan pedoman khusus pelaksanaan program pengajaran masing-masing bidang studi. Pedoman khusus pelaksanaan pengajaran tersebut meliputi uraian tentang pendekatan dan metode mengajar yang digunakan untuk bidang studi tertentu, kemudian juga alat dan sarana yang diperlukan serta cara-cara penilaian hasil belajar yang digunakan. Secara ringkas, kegiatan dan pengembangan kurikulum pada tiap bidang studi meliputi, penyusunan tujuan kurikuler, perumusan tujuan instruksional umum, dan menetapkan pokok bahasan.

3) Pengembangan program pengajaran di kelas

Pengembangan program pengajaran di kelas ini merupakan tahap kewenangan guru untuk mengembangkan program pengajaran di kelas. Untuk mengembangkan program pengajaran di kelas, guru perlu memiliki kemampuan lebih lanjut dalam bentuk Satuan Pelajaran (SP). Satuan pelajaran ini dilaksanakan oleh para pendidik dalam rangka mengembangkan kegiatan program pengajaran di kelas. Akan tetapi, apabila bahan pengajaran yang dikembangkan GBPP sudah dikelompokkan menjadi satuan-satuan bahasan, pendidik tidak perlu lagi menyusun atau menentukan satuan bahasan. Satuan bahasan ini langsung dikembangkan menjadi satuan pelajaran (SP) untuk pedoman guru dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas.

Satuan pelajaran (SP) merupakan sistem yang memiliki komponen-komponen²²

10. Tujuan Instruksional Umum (yang diperoleh dari GBPP)

11. Tujuan Instruksional Khusus (yang merupakan penjabaran dari TIU)

12. Bahan pelajaran

13. Proses belajar mengajar

14. Alat dan sumber belajar
15. Penilaian/evaluasi

Tujuan penggunaan satuan pelajaran (SP) bagi guru adalah agar dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Benikut ini tabel yang diharapkan dapat membantu dalam memahami tahap-tahap pengembangan kurikulum di tiap lembaga, sebagaimana yang dinyatakan oleh Subandijah.²³

Tabel 2 : Bagan kesimpulan pada tiap lembaga

No	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Sekolah	Tingkat Kela
1.	Penetapan kebijaksanaan pendidikan	Penetapan kebijakan pendidikan untuk tingkat provinsi	Pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan institusional	Pengembangan tujuan kurikulum institusional umum dan khusus
2.	Pengembangan; - Rasional program - Tujuan program - Hasil belajar semuanya berdasarkan perkiraan keadaan tingkat nasional	Penerjemahan: - Rasional program - Tujuan program - Hasil belajar semuanya berdasarkan perkiraan keadaan tingkat provinsi	Perincian: - Rasional program - Tujuan program - Hasil belajar semuanya berdasarkan perkiraan kebutuhan-kebutuhan tingkat sekolah	Pelaksanaan: - Rasional program - Tujuan program - Hasil belajar semuanya berdasarkan perkiraan kebutuhan siswa
3.	Pengarahan: - Program - Sumber belajar - Metodologi - Pengembangan evaluasi kurikulum (terutama <i>discipline, inquiry, dan value judgment</i>)	Bimbingan penyusunan: - Satuan pelajaran - Identifikasi metodologi - Pengembangan evaluasi kurikulum (<i>institutional process approach school program</i>)	Pengembangan satuan pelajaran yang mencakup: - Identifikasi sumber belajar - Strategi belajar mengajar - Evaluasi kurikulum dengan sasaran program sekolah	Pelaksanaan satuan pelajaran yang mencakup: - Identifikasi sumber bela - Strategi bela mengajar - Teknik evaluasi

E. Penutup

Kebijakan perubahan dan pemberlakuan kurikulum baru dilandasi atas berbagai pertimbangan yang cukup mendasar, antara lain adalah bahwa

kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan. Tujuan-tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan tidak akan pernah tercapai tanpa didasarkan dan diarahkan oleh kurikulum, karena kurikulum inilah yang akan mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan harus mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang bertakwa, cerdas, terampil dan berbudi luhur, bettu, bermoral, tidak hanya sebagai mata pelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik semata-mata, melainkan sebagai aktivitas pendidikan yang ditencanakan untuk diajari, diterima dan dilakukan.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap proses (tahapan) pengembangan kurikulum secara hierarkis, dan keterkaitan antara pengembangan kurikulum pada tingkat nasional dengan tahap kelembagaan, serta tahap pengembangan bidang studi dan pengembangan kurikulum di kelas merupakan pengetahuan dan pemahaman cukup penting dan signifikan dalam pelaksanaan pendidikan. Demikian juga dengan tahap-tahap pengembangan kurikulum pendidikan nasional yang dilaksanakan oleh guru atau pendidik, sehingga tercapai tidaknya atau berhasil tidaknya kurikulum suatu pendidikan sangat tergantung pada pelaksanaannya (guru atau pendidik).

Daftar Pustaka

Depdiknas, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Buku Panduan, Jakarta: Direktorat SLTP Ditjen Dikdasmen, Depdiknas, 2001.

DJohar, Pendidikan Strategik Alternatif untuk .Pendidikan Masa depan, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Idi Abdullah, Pengembangan kurikulum: Teori dan Praktek., Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2007.

Marsh, C. dan Stafford, K., Curriculum Practices and Issues, Sydney: McGraw Hill Book Company, 1988.

Soetopo, H.S dan Soemanto, W., Pembinaan dan Pengembangan Kuriikulum: sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Subandijab, pengembangan dan Inovasi kurikulum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Sudjana, pengembangan dan pengembangan kurikulum di Sekolah, Bandung: Sinar Baru, 1991.

Susilo, Muhammad Joko, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Manajemen pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Tilaar, H.A.R, Paradigma Bani Pendidikan Nasional Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

limaedi, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Sebuah Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sekolah untuk Peningkatan Mutu, Jakarta Depdikbud, 2001.